

Komunikasi untuk Pembangunan dan Inklusi Sosial di Kawasan ASEAN: Strategi, Tantangan, dan Praktik Terbaik

Zulfiah Larisu¹, Sumadi Dilla², Wa Ode Nila Farlin³, La Ode Ramalan⁴, Riskha Amalia Bahar⁵

Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Halu Oleo Kendari^{1,2,3,4}, Program Studi Administrasi Pembangunan Pascasarjana Universitas Halu Oleo Kendari⁵

zulfiahlarisu_fisip@uho.ac.id¹

Artikel diserahkan pada: 10-11-2025; direvisi pada: 20-11-2025; diterima pada: hhhbtttt.

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi berperan sebagai instrumen pembangunan dan inklusi sosial di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kasus komparatif di tiga negara Indonesia, Thailand, dan Filipina. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen resmi, serta kampanye komunikasi digital di platform YouTube, Instagram, dan X (Twitter). Kerangka analisis penelitian secara tematik (*thematic analysis*) untuk mendapatkan makna dari data yang dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi yang digunakan masih cenderung *top-down* dan belum sepenuhnya partisipatif. ASEAN Digital Literacy Programme, serta pemberdayaan perempuan di sektor pariwisata menunjukkan kemajuan signifikan dalam mendorong inklusi sosial, tetapi masih memerlukan penguatan di tingkat kebijakan nasional dan lokal. Penerapan prinsip *voice and participation*, pemanfaatan teknologi komunikasi yang inklusif, serta sinergi kebijakan antarnegara ASEAN merupakan strategi yang efektif dalam Pembangunan dan inklusi sosial di Kawasan Asia Tenggara.

Kata Kunci: ASEAN, Inklusi Sosial, Komunikasi Pembangunan, Komunikasi Inklusi, literasi digital.

PENDAHULUAN

Kawasan Asia Tenggara (ASEAN) merupakan wilayah yang memiliki tingkat keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang sangat tinggi. Setiap negara anggota ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Brunei Darussalam, dan

Singapura, memiliki struktur sosial dan politik yang berbeda, serta dinamika ekonomi yang beragam. Keragaman ini menjadi kekuatan sekaligus tantangan bagi integrasi dan pembangunan kawasan. Dari sisi sosial-budaya, ASEAN dikenal sebagai kawasan dengan pluralitas etnis, bahasa, dan agama yang tinggi. Misalnya, Indonesia

memiliki lebih dari 1.300 kelompok etnis, sementara Myanmar dan Filipina juga memiliki keberagaman etnolinguistik yang luas (Secretariat, 2021).

Pertumbuhan ekonomi di kawasan ini relatif cepat, terutama dalam dua dekade terakhir, yang ditandai dengan peningkatan investasi, industrialisasi, dan digitalisasi. Namun, perkembangan tersebut tidak selalu diikuti oleh pemerataan kesejahteraan. Terdapat ketimpangan yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah, serta antara mereka yang memiliki akses terhadap teknologi dengan yang tidak (Achim Steiner, 2021). Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di kawasan ini belum sepenuhnya inklusif.

Dalam konteks pembangunan sosial, tantangan utama ASEAN terletak pada upaya memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan. Kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas, masyarakat adat, perempuan, dan minoritas etnis sering kali masih menghadapi hambatan struktural dalam mengakses layanan publik, pendidikan, dan partisipasi politik. Hal ini diperparah oleh faktor kultural dan kebijakan nasional yang belum sepenuhnya

mendukung kesetaraan (AMARTYA SEN, 2000).

Sebagai contoh, laporan ASEAN *Enabling Masterplan 2025: Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities* menegaskan bahwa meskipun sebagian negara ASEAN telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), implementasinya masih menghadapi kendala akibat keterbatasan akses informasi, stigma sosial, dan komunikasi publik yang belum inklusif (Asean, 2025). Demikian pula, perempuan dan kelompok masyarakat adat di beberapa negara ASEAN masih menghadapi diskriminasi dalam kebijakan ekonomi maupun representasi politik (UN Women, 2023).

Inklusi sosial menjadi isu penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di ASEAN. Konsep ini tidak hanya menekankan keadilan dalam distribusi sumber daya, tetapi juga partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pengambilan keputusan. AMARTYA SEN, (2000) menegaskan bahwa pembangunan yang sejati adalah pembangunan yang memperluas kebebasan manusia termasuk kebebasan untuk berpartisipasi, berkomunikasi, dan berkontribusi dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, pembangunan di kawasan ASEAN memerlukan strategi komunikasi yang bersifat inklusif,

partisipatif, dan sensitif terhadap keragaman budaya. Komunikasi yang berorientasi pada dialog, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat merupakan prasyarat untuk memastikan bahwa pembangunan benar-benar menyentuh seluruh lapisan sosial tanpa terkecuali.

Dengan demikian, komunikasi inklusif untuk pembangunan di kawasan ASEAN tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi pembangunan, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk menjembatani perbedaan, memperkuat solidaritas regional, dan memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal (*no one left behind*) dalam proses pembangunan kawasan (*Human Development Report*, 2022; Asean, 2025). Oleh karena itu, menarik untuk dikaji praktik komunikasi pembangunan yang diterapkan dalam konteks inklusi sosial di negara-negara ASEAN.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kasus. Artinya selain bertujuan untuk memahami fenomena komunikasi pembangunan dan inklusi sosial secara mendalam melalui penelusuran isi dokumen untuk menemukan makna, konteks, dan proses sosial di balik kebijakan serta praktik komunikasi publik di kawasan ASEAN; juga

membandingkan kasus (*comparative case study*) di tiga negara ASEAN, yaitu Indonesia, Thailand, dan Filipina. Ketiga negara dipilih berdasarkan pertimbangan: Indonesia, memiliki kebijakan komunikasi pembangunan melalui program literasi digital dan inklusi sosial oleh Kementerian Kominfo. Thailand, aktif mengembangkan strategi komunikasi berbasis masyarakat dalam kebijakan pembangunan pedesaan (Tirto, 2020) dan Filipina, dikenal dengan implementasi *ASEAN ICT Masterplan* (Digital, 2025) yang menekankan pemberdayaan digital untuk inklusi sosial. Unit analisis penelitian ini adalah praktik komunikasi pembangunan dan kebijakan inklusi sosial yang dijalankan oleh lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta aktor media digital di tiga negara tersebut.

Data dikumpulkan melalui teknik studi dokumen kebijakan, postingan media sosial, artikel, iklan, dan observasi terhadap kampanye komunikasi digital. Kemudian dianalisis secara tematik (*thematic analysis*) untuk menemukan pola dan makna dalam data kualitatif (Braun & Clarke, 2006 dalam Al Ghazali, 2014). Langkah-langkah analisis meliputi: Reduksi data, mengorganisasi data dari studi dokumen dan observasi ke dalam kategori awal; Koding tematik, mengidentifikasi tema-tema utama seperti *partisipasi masyarakat*,

representasi kelompok marginal, dan *akses komunikasi digital*, dan Analisis komparatif antar kasus, membandingkan hasil analisis di Indonesia, Thailand, dan Filipina. Penarikan kesimpulan dengan merumuskan temuan yang menggambarkan praktik terbaik (*best practices*) dan tantangan komunikasi pembangunan inklusif di ASEAN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan telaah terhadap sejumlah dokumen kebijakan dan laporan internasional yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga regional dan global yang relevan, terkait tema-tema strategi komunikasi, tantangan implementasi, dan praktik terbaik di kawasan ASEAN ditemukan hasil sebagai berikut.

1. Strategi Komunikasi untuk Pembangunan dan Inklusi Sosial

Beberapa strategi komunikasi pembangunan dalam inklusi sosial yaitu:

1. Pendekatan Partisipatif dan Komunitas, dengan melibatkan masyarakat lokal melalui media komunitas seperti radio desa di Thailand (Asean, 2025). Pendekatan ini berperan signifikan dalam memperkuat *voice* masyarakat lokal. Proses komunikasi dilakukan melalui pemetaan komunitas, dialog warga, serta produksi konten berbasis kebutuhan lokal. Pelibatan warga dalam produksi pesan

terbukti meningkatkan rasa memiliki dan efektivitas komunikasi pembangunan. Temuan ini sejalan dengan perspektif komunikasi partisipatif yang menekankan *two-way communication* sebagai fondasi perubahan sosial (Servaes, 2019).

2. Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Inklusi, untuk mengurangi kesenjangan digital dan memperkuat literasi digital bagi kelompok rentan (*Human Development Report*, 2022). Teknologi digital merupakan instrumen krusial untuk mengurangi kesenjangan akses informasi antarkelompok masyarakat. Program literasi digital yang diberikan kepada kelompok rentan meningkatkan kemampuan mereka mengakses layanan publik, informasi kesehatan, maupun peluang ekonomi. Selain itu, penyediaan akses internet murah dan pusat layanan digital (*telecenter*) membantu memperluas partisipasi kelompok berisiko tertinggal. Proses strategis ini sesuai dengan temuan Human Development Report (2022) bahwa inklusi digital merupakan determinan utama pengembangan kualitas manusia.
3. Komunikasi Berbasis Nilai Budaya dan Multibahasa, bentuk adaptasi pesan komunikasi dengan konteks budaya dan bahasa lokal (UNICEF,

2019). Adaptasi pesan komunikasi berdasarkan nilai budaya dan bahasa lokal terbukti meningkatkan penerimaan publik. Melalui ko-desain pesan komunikasi bersama tokoh lokal, pesan menjadi lebih relevan secara kultural serta menghindari resistensi sosial. Penerjemahan pesan ke dalam bahasa daerah dan penggunaan simbol budaya memperkuat efektivitas penyampaian pesan. Temuan ini konsisten dengan laporan UNICEF (2019) yang menekankan bahwa keberhasilan komunikasi sosial sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan konteks budaya

4. Kolaborasi antar sektor dan lintas negara, mengintegrasikan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, seperti dalam program ASEAN *Smart Cities Network*. Kolaborasi antar pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil merupakan faktor kunci dalam menciptakan pembangunan inklusif di kawasan ASEAN. Melalui mekanisme seperti ASEAN Smart Cities Network, pertukaran praktik baik, harmonisasi kebijakan, dan integrasi program dapat dilakukan secara lebih efektif. Kolaborasi ini mencegah fragmentasi kebijakan sekaligus memperkuat kapasitas regional dalam mengembangkan

sistem komunikasi pembangunan yang lebih komprehensif.

2. Tantangan Utama dalam Implementasi Komunikasi Inklusif di ASEAN

Tantangan-tantangan dalam Implementasi Komunikasi Pembangunan Inklusif di ASEAN ditemukan, antara lain:

1. Kesenjangan Digital dan Infrastruktur Komunikasi (Achim Steiner, 2021). Kesenjangan digital membuat sebagian masyarakat, terutama di wilayah rural dan kepulauan, tertinggal dalam memperoleh informasi dan partisipasi pembangunan. Keterbatasan jaringan internet, biaya perangkat yang mahal, serta minimnya pusat layanan digital menghambat proses komunikasi dua arah dan memperlebar jurang ketidaksetaraan sosial

2. Hambatan Bahasa dan Literasi Media (UNICEF, 2019). ASEAN merupakan kawasan multibahasa dan multikultural, sehingga perbedaan bahasa serta rendahnya literasi media menjadi tantangan signifikan. Pesan komunikasi pembangunan sering tidak tersampaikan secara efektif karena tidak disesuaikan dengan bahasa lokal atau kemampuan literasi masyarakat. Hal ini memperlemah pemahaman publik terhadap isu penting, seperti kesehatan, pendidikan, atau mitigasi bencana, serta berpotensi

menciptakan misinformasi dan eksklusi sosial.

3. Keterbatasan Representasi Kelompok Rentan (UN-WOMEN, 2016). Kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan minoritas ekonomi, sering kali tidak terwakili secara memadai dalam praktik komunikasi pembangunan. Ketidaksetaraan gender dan sosial, mengurangi peluang mereka dalam berpartisipasi, menyuarakan kebutuhan, atau terlibat dalam pengambilan keputusan. Minimnya representasi ini menyebabkan komunikasi pembangunan cenderung bias, tidak inklusif, dan gagal menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

4. Isu Sensitivitas Politik dan Kebebasan Ekspresi (Sen, 2000 dalam Pratiyudha, 2020). Di beberapa negara ASEAN, dinamika politik dan regulasi media menjadi tantangan tersendiri bagi komunikasi inklusif. Keterbatasan kebebasan berekspresi, kontrol media, dan isu sensitivitas politik dapat membatasi ruang dialog publik. Situasi ini membuat proses komunikasi bersifat *top-down* dan menghambat pembentukan ruang partisipatif yang kritis serta transparan. Akibatnya, inisiatif pembangunan cenderung tidak responsif terhadap aspirasi Masyarakat.

3. Praktik Terbaik (*Best Practices*)

Praktik baik komunikasi pembangunan inklusi di ASEAN ditemukan, sebagai berikut.

1. Program 'Desa Inklusif' di Indonesia, melibatkan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan (*Kominfo*, 2022). Program ini menekankan mekanisme musyawarah desa yang memberi ruang partisipasi setara, penyediaan akses informasi melalui teknologi desa, serta pendampingan berbasis komunitas. Praktik ini menunjukkan bahwa partisipasi yang luas dapat meningkatkan kepekaan kebijakan terhadap kebutuhan kelompok marginal.
2. *Community Radio Network* di Thailand, media komunitas untuk partisipasi warga desa (Tirto.id, 2020). Jaringan radio komunitas berfungsi sebagai *platform* komunikasi dua arah yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi, berbagi pengetahuan tradisional, serta mengawasi kebijakan lokal. Praktik ini mencerminkan prinsip *grassroots communication* yang relevan bagi masyarakat pedesaan dengan keterbatasan akses internet.
3. *Digital Empowerment Project* di Filipina, aplikasi digital bagi penyandang disabilitas (Asean, 2025). proyek ini mengintegrasikan

fitur *assistive technology*, seperti pembaca suara dan navigasi visual sederhana, sehingga meningkatkan kemandirian pengguna. Praktik ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat menjadi alat pemberdayaan apabila dirancang berdasarkan inklusi universal.

4. ASEAN *Smart Cities Network*, adalah Kolaborasi lintas kota berbasis data dan partisipasi publik. ASEAN *Smart Cities Network* adalah platform kolaboratif lintas negara yang menghubungkan kota-kota di ASEAN melalui pemanfaatan data, teknologi digital, dan partisipasi publik. ASCN mendorong pembangunan kota cerdas yang berfokus pada keberlanjutan, mobilitas, dan layanan publik berbasis data. Melalui pertukaran praktik baik dan harmonisasi kebijakan, jaringan ini meningkatkan kapasitas kota untuk mengembangkan solusi inovatif yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan warga.

ASEAN telah berupaya menjadikan komunikasi sebagai instrumen penting dalam mendorong inklusi sosial dan pembangunan yang berkeadilan. Inisiatif seperti *ASEAN Digital Literacy Programme*, *ASEAN Enabling Masterplan 2025*, *Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities*, serta berbagai kampanye berbasis komunitas yang diinisiasi oleh

lembaga-lembaga seperti *ASEAN Foundation* dan *ASEAN SOGIE Caucus*, mencerminkan adanya komitmen regional untuk memastikan bahwa komunikasi publik mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi (ASEAN Secretariat, 2020; Achim Steiner, 2021).

Namun demikian pendekatan komunikasi pembangunan di ASEAN masih cenderung bersifat *top-down*, dimana pesan, agenda, dan arah komunikasi sering kali ditentukan oleh lembaga negara atau organisasi regional tanpa partisipasi penuh dari kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program. Dalam konteks teori partisipasi pembangunan (Servaes, 2008), kondisi ini menunjukkan bahwa model komunikasi yang dominan masih berorientasi pada penyampaian informasi (*information dissemination*) ketimbang pada *dialogue* dan *participatory communication*.

Servaes, (2008) menekankan bahwa komunikasi pembangunan yang efektif harus berakar pada proses dialogis, di mana masyarakat tidak sekadar menjadi penerima pesan, tetapi juga berperan aktif dalam merumuskan masalah, menentukan prioritas, serta mengevaluasi hasil program. Ketika komunikasi pembangunan bersifat satu arah, hasilnya sering kali hanya menghasilkan perubahan perilaku jangka pendek tanpa menciptakan transformasi sosial yang

berkelanjutan. Dalam konteks ASEAN, masih terlihat adanya kesenjangan antara komitmen kebijakan yang menekankan inklusi dan praktik komunikasi yang belum sepenuhnya membuka ruang partisipasi bagi kelompok marginal seperti penyandang disabilitas, perempuan di pedesaan, masyarakat adat, dan minoritas etnis (UNESCAP, 2022).

Selain persoalan partisipasi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi yang inklusif masih belum merata di seluruh negara anggota. Program berbasis digital seperti kampanye literasi digital, pemberdayaan perempuan di sektor pariwisata, dan advokasi hak disabilitas telah membuka peluang baru untuk partisipasi sosial. Namun, akses terhadap internet, kemampuan literasi media, dan infrastruktur teknologi yang berbeda antarnegara menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan pemerataan manfaat komunikasi digital (Sefalana, 2019). Negara-negara seperti Indonesia dan Thailand menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengembangkan ekosistem komunikasi publik berbasis digital, tetapi negara dengan infrastruktur terbatas seperti Laos dan Myanmar masih menghadapi hambatan struktural (World bank (2022).

Berdasarkan konteks teori komunikasi inklusif (Couldry & Hepp,

2017), hasil penelitian ini memperlihatkan pentingnya prinsip *voice and participation*, yaitu pengakuan terhadap suara beragam kelompok sosial sebagai bagian integral dari wacana publik. Couldry & Hepp, (2017) mengemukakan bahwa dalam era *mediatized society*, keadilan sosial tidak hanya diukur dari akses terhadap media, tetapi juga dari sejauh mana setiap individu memiliki kapasitas untuk didengar dalam ruang publik. Komunikasi inklusif tidak hanya menuntut penyediaan saluran, tetapi juga redistribusi kekuasaan simbolik agar suara kelompok yang termarginalkan dapat diakui dan dipertimbangkan dalam proses kebijakan publik.

KESIMPULAN

Komunikasi pembangunan di kawasan ASEAN akan lebih efektif apabila diarahkan pada tiga prinsip utama, yaitu *voice and participation*, memperkuat kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam perumusan agenda pembangunan melalui pendekatan partisipatif berbasis dialog komunitas, forum daring, dan mekanisme konsultasi publik lintas negara; pemanfaatan teknologi inklusif, memperluas akses teknologi komunikasi dengan memastikan keterjangkauan, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta pelatihan literasi digital bagi kelompok masyarakat berisiko tertinggal; serta

sinergi kebijakan antarnegara ASEAN, memperkuat koordinasi regional dalam kebijakan komunikasi publik agar kampanye dan inisiatif pembangunan sosial tidak berjalan terfragmentasi. Sinergi ini dapat diwujudkan melalui kerja sama antar-kementerian komunikasi dan lembaga masyarakat sipil lintas negara untuk berbagi praktik terbaik dan standar inklusi sosial. Dengan demikian, pendekatan komunikasi pembangunan bukan sekadar menuntut partisipasi level komunitas lokal, melainkan juga harus diperluas menjadi partisipasi multilevel lintas negara di kawasan ASEAN. Selain itu, keberhasilan komunikasi pembangunan regional membutuhkan pemanfaatan teknologi yang bukan hanya modern, dan sekadar faktor pendukung literasi digital, tetapi prasyarat bagi kohesi sosial regional. Sehingga, ketika komunikasi pembangunan dikelola secara partisipatif dan inklusif, maka pembangunan di kawasan ASEAN akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, sekaligus memperkuat kohesi sosial dan rasa kebersamaan antar warga negara ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

- Achim Steiner. (2021). *United Nations Development Programme Annual Report 2021*. 9–13.
- Al Ghazali, F. (2014). A Critical Overview of Designing and Conducting Focus Group Interviews in Applied Linguistics Research. *American Journal of Educational Research*, 2(1), 6–12. <https://doi.org/10.12691/education-2-1-2>
- AMARTYA SEN. (2000). Social Exclusion: Concept, Application, and Scrutiny. Manila: Asian Development Bank. *Journal of Human Development*, 1(1).
- Asean, D. (2025). ASEAN Digital Masterplan EDITED. *The Association of Southeast Asian Nations*, 1, 27–28.
- ASEAN Secretariat. (2021). ASEAN Digital Inclusion Framework 2021–2025. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Couldry, N., & Hepp, A. (2017). *The Mediated Construction of Reality: Matching Berger & Luckmann with Elias to Understand How Facebook and Google Construct Our Social Reality*. 1–4.
- Human Development Report. (2022). Report 2021/2022. In UNDP. https://hdr.undp.org/system/files/documents/...report.../hdr2021-22pdf_1.pdf
- Pratiyudha, P. P. (2020). Meninjau Tanggungjawab Sosial Perusahaan dalam Pendekatan Kapabilitas. *Jurnal Sosial Politik*, 6(1), 16. <https://doi.org/10.22219/sospol.v6i1.11214>
- Secretariat, A. (2021). *ASEAN Digital Inclusion Framework 2021–2025*. Jakarta: ASEAN Secretariat.

- Sefalana. (2019). Annual Report.
Fresenius.com, December 2–2.
- Servaes, J. (2008). Communication for development and social change. In *Communication for Development and Social Change* (Issue January 2008).
<https://doi.org/10.4135/9788132108474>
- Kominfo. (2022). Laporan Desa Inklusif dan Transformasi Digital Indonesia. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
- Tirto.id. (2020). Radio Komunitas dan Partisipasi Warga di Pedesaan Thailand
- UN-WOMEN. (2016). UN Trust Fund to End Violence against Women. *UN Women*, 3.
<http://www.unwomen.org/en/trust-funds/un-trust-fund-to-end-violence-against-women>
- UN Women. (2023). *Gender Equality and Social Inclusion in ASEAN: Regional Review Report 2022*. Bangkok: UN Women Asia-Pacific.
- UNESCAP. (2022). Asia and the Pacific SDG Progress Report 2022: Widening disparities amid COVID-19. In *United Nations Publication*.
- UNICEF. (2019). *Communication for Development (C4D): Global Annual Results Report 2018*. UNICEF 3 United Nations Plaza New York, NY 10017. www.unicef.org
- World Bank (2022). (2022). *Helping Countries Adapt*. 1–116.